



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
DAN
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TENTANG
PENEMPATAN MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA ATAU KULIAH
KERJA LAPANGAN DI POS BANTUAN HUKUM DESA ATAU
KELURAHAN**

NOMOR : W.12-156.HH.04.04 TAHUN 2025

NOMOR : 2606/Un.17/F.II.I/PP.00.9/09/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal 2 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PAGAR BUTAR BUTAR** : selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-21.KP. 03.03 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, berkedudukan di Jl. K.H. Sam'un No. 44D Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, selanjutnya disebut Pihak I.

b

2. IIN RATNA SUMIRAT : selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, berkedudukan di Jl Syech Nawawi al Bantani, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, selanjutnya disebut Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara bersama- sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah.
- b. Pihak II adalah Fakultas Syariah pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 tentang tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum;
3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; dan
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penempatan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata atau Kuliah Kerja Lapangan di Pos Bantuan Hukum Desa atau Kelurahan yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan:

- a. memfasilitasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata atau Kuliah Kerja Lapangan mahasiswa Fakultas Syariah pada Pos Bantuan Hukum Desa atau Kelurahan binaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten;
- b. meningkatkan literasi hukum dan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat desa atau kelurahan;
- c. meningkatkan kompetensi dan pengalaman praktis mahasiswa Fakultas Syariah dalam pemberdayaan hukum masyarakat; dan
- d. meningkatkan kerja sama dalam pelaksanaan penyuluhan hukum antara Fakultas Syariah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. penempatan mahasiswa Fakultas Syariah yang melaksanakan kuliah kerja nyata atau kuliah kerja lapangan pada Pos Bantuan Hukum Desa atau Kelurahan; dan
- b. pelaksanaan penyuluhan hukum, pendampingan Pos Bantuan Hukum, serta kegiatan lain yang mendukung pemberdayaan hukum masyarakat oleh mahasiswa di bawah supervisi dosen pembimbing dan/atau pihak Pos Bantuan Hukum.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Pihak I berhak:

- a. menentukan Pos Bantuan Hukum Desa atau Kelurahan yang dapat menjadi lokasi penempatan mahasiswa;
- b. memberikan arahan teknis pelaksanaan kegiatan di Pos Bantuan Hukum Desa atau Kelurahan; dan
- c. melakukan koordinasi kegiatan dengan desa atau kelurahan dalam rangka penyuluhan hukum.

8

(2) Pihak II berhak:

- a. menempatkan mahasiswa sesuai jumlah dan jadwal;
- b. memberikan arahan teknis pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata atau Kuliah Kerja Lapangan;
- c. menunjuk dosen pembimbing lapangan untuk mengawasi dan membimbing mahasiswa; dan
- d. melakukan koordinasi kegiatan penyuluhan hukum di desa atau kelurahan.

Pasal 4

- (1) Para Pihak berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan mahasiswa selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata atau Kuliah Kerja Lapangan.
- (2) Pihak II melaporkan hasil pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata atau Kuliah Kerja Lapangan pada Pos Bantuan Hukum kepada Pihak I.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa Perjanjian ini berakhir, Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian.
- (3) Perjanjian ini dapat diubah atas kesepakatan Para Pihak.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1)** Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2)** Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

Pihak I:

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten
Jl. K.H. Sam'un No. 44D Serang
Telp : 08119920254

Pihak II:

Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Jl Syech Nawawi al Bantani,
Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug,
Kota Serang
Telp : 0254200323

- (3)** Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada Para Pihak.
- (4)** Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 8
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PEMANTAUAN EVALUASI

- (1)** Pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Para Pihak.

f

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan Para Pihak atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini atas itikad baik, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagai naskah asli masing-masing untuk Para Pihak dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.



PIHAK I

PAGAR BUTAR BUTAR



PIHAK II



IIN RATNA SUMIRAT